



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKIP DAN DOKUMEN AKIP DINAS TENAGA KERJA ESDM
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 11 Maret 2025

Fasilitator



MASRUL, ST

NIP. 19840318 201101 1 001

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis capaian, tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan sesuai dengan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam Laporan ini kami berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap target dan capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Laporan ini telah disusun dengan optimal, namun masih terdapat kekurangan baik dari aspek substansi maupun redaksional. Olehnya saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran secara sistematis serta mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang dapat menjadi referensi terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Gorontalo, Maret 2025

KEPALA DINAS



Drs. Wardoyo Mansur Pongoliu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196905241989021002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada public sebagai salah satu Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan indikator kinerja dalam LKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Berikut gambaran capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan target 26,50% dan terealisasi sebesar 24,23%
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif, dengan indikator kinerja Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan target 3,49% dan terealisasi sebesar 5,45%
4. Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan, dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik dengan target 39,74% dan terealisasi sebesar 34,96%
5. Pembangunan Rendah Karbon, dengan indikator kinerja Persentase bauran energi terbarukan dengan target 13,58% dan terealisasi sebesar 12,35%
6. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis, dengan indikator kinerja Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan target 91,34% dan terealisasi sebesar 36,22%
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI dengan target BB dan terealisasi dengan predikat BB

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Keadaan Pegawai	4
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	5
1.6. Kondisi Keuangan	8
1.7. Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.4. Indikator Kinerja Utama	15
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
2.6. Rencana Anggaran Tahun 2024	18
2.7. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	20
2.8. Instrument Pendukung	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	5
Tabel 1.2 Data Aset Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	6
Tabel 1.3 Alokasi APBD pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	18
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	20
Tabel 3.1 Skala Penilaian dari Hasil Pengukuran Kinerja	24
Tabel 3.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	24
Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024	30
Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel 3.6 Efisiensi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.7 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024	52

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	1
Gambar 2.1 Aplikasi e-Monev	21
Gambar 2.2 Aplikasi New Siransija	22
Gambar 2.3 Aplikasi si-Dalev	22



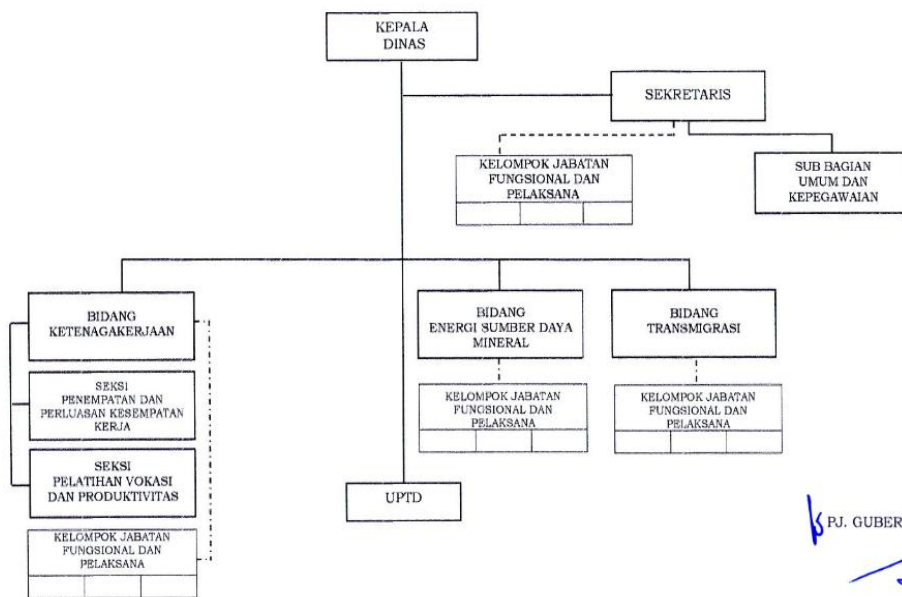
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memiliki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Ketenagakerjaan
4. Bidang Energi Sumber daya Mineral
5. Bidang Transmigrasi
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tugas Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Gubernur di Bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi
- b. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi
- c. pemantauan dan evaluasi Program bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi
- d. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.

1.3. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Renstra K/L dan RTRW Provinsi, kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis dilingkup Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah :

Urusan Ketenagakerjaan

Dalam rentra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 menuangkan isu penting urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan daerah yang dikhususkan pada peningkatan capaian indikator penilaian yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah provinsi urusan tenaga kerja.
2. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja serta serapan tenaga kerja.
3. Peningkatan persentase penyelesaian masalah pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan hubungan industrial
4. Peningkatan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
5. Peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimum provinsi

Urusan ESDM

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan energi ketenagalistrikan

Kegiatan yang akan menunjang isu ini adalah pemasangan listrik gratis pada rumah masyarakat kurang mampu yang belum terjangkau listrik. Sampai dengan tahun 2021 jumlah rumah tangga yang telah dipasang listrik oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sejumlah 7241 rumah tangga, dan target yang akan dipasang pada tahun 2023 – 2026 adalah sejumlah 1000 rumah tangga sasaran

2. Menetapkan Zona Konservasi pada cekungan Air Tanah dan nilai perolehan Air Tanah

Provinsi Gorontalo memiliki 9 (sembilan) cekungan air tanah, dimana sembilan cekungan air tanah ini belum dilakukan pemetaan dan penetapan zona konservasinya. Dari sembilan cekungan tersebut baru 1 CAT yang telah memiliki data dan peta, oleh karena itu masih terdapat 4 8 CAT yang perlu intervensi untuk di petakan dan di tetapkan zona konservasinya.

3. Peningkatan pengawasan pemanfaatan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Kewenangan penyelenggaraan pertambangan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal

mulai berlaku sejak terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Namun pada awal 2022 kewenangan tersebut kembali di deegasikan ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 11 April 2022. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan pengawasan pada sektor pertambangan setelah 2 (dua) tahun kewenangan menjadi kewenangan pusat.

Urusan Ketrasmigrasian

Kawasan transmigrasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Kawasan Pulubala (sesuai SK No. 9 tahun 2016)
- b. Kawasan Pawonsari (Sesuai SK No. 9 tahun 2016)
- c. Kawasan Taluditi (Sesuai SK No. 91 tahun 2016)
- d. Kawasan Sumalata (Sesuai SK No. 71 tahun 2018)

Empat kawasan tersebut di atas belum di serahkan ke kabupaten sesuai lokasinya, jumlah keluarga yang tinggal pada kawasan tersebut adalah sejumlah 1069 KK. Oleh karena itu masih perlu interfensi program kegiatan oleh Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, program kegiatan tersebut mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi
2. Peningkatan ekonomi warga transmigrasi

1.4. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi seluruhnya berjumlah 103 orang. Ditinjau dari sisi jabatan maka pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	5	9	3	4
2	Bidang Ketenagakerjaan	16	18	5	6
3	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	17	7	5	2
4	Bidang Transmigrasi	5	1	3	1
5	UPT BLK	12	10	1	1
Jumlah I		55	45	17	14
Jumlah ASN dan Non ASN		100		31	
Jumlah Keseluruhan		131			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2024

1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Data Aset Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Urusan ESDM					
1	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik		
2	Meja Tambahan	8	Baik		
3	Kursi Pitar	1	Baik		
4	AC Unit	4	Baik		
5	PC Unit	9	Baik		
6	Note Book	7	Baik		
7	Printer	8	Baik		
8	Peralatan Personal Kompter Lain-lain	3	Baik		
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik		
10	Perkakas Khusus Lain-lain	1	Baik		
11	Global Positioning System	1	Baik		
12	Ampere Meter	1	Baik		
13	Mesin Proses Lain-lain	1	Baik		
14	Kursi Rapat	10	Baik		
15	Geolistrik	1	Baik		
16	Scanner	1	Baik		
17	External	1	Baik		
18	Mobil Pick Up	1	Baik		
19	Tanah bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	Baik		
Urusan Nakertrans					
20	Pompa Lain-lain	1	Baik		
21	Display	3	Baik		

22	Wireless	1	Baik		
23	Camera Digital	1	Baik		
24	Note Book	1	Baik		
25	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2	Baik		
26	Jalan Desa Lain-lain	1	Baik		
27	Lemari Kayu	1	Baik		
28	Camera Digital	1	Baik		
29	Handy Cam	2	Baik		
30	Mini Komputer	1	Baik		
31	Laptop	2	Baik		
32	Printer	5	Baik		
33	AC Unit	1	Baik		
34	Televisi	2	Baik		
35	Sound System	2	Baik		
36	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	8	Baik		
37	Monitor	1	Baik		
38	Proyektor + Attachment	3	Baik		
39	Organ/Electone	1	Baik		
40	Meja Kerja Pejabat Ess IV	22	Baik		
41	Meja Kerja Pegawai Lain-lain	1	Baik		
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	Baik		
43	Meja Rapat	1	Baik		
44	Kursi Kerja Pejabat Ess III	5	Baik		
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktur	22	Baik		
46	Kursi Rapat Pejabat Ess II	16	Baik		
47	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	61	Baik		

48	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	2	Baik		
49	Kursi Sofa	4	Baik		
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik		
51	Bangunan Mandi Cuci Kasus (MCK)	1	Baik		
52	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	1	Baik		
53	Alat Musin Nasional/Daerah	1	Baik		
54	Station Wagon (SUV, MPV)	2	Baik		
55	Sepeda Motor	4	Baik		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2024

1.6. KONDISI KEUANGAN

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Alokasi APBD pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

No	Tahun Anggaran	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan ESDM	Urusan Ketransmigrasian
1	2023	14.647.795.781	2.280.154.100	529.630.000
2	2024	15.775.940.243	811.445.500	374.260.000
Total		30.423.736.024	3.091.599.600	903.890.000

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Sub bab Pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut :

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Keadaan Pegawai
- E. Keadaan Sarana dan Prasarana
- F. Kondisi Keuangan
- G. Sistematika LAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan. Sub bab Perencanaan Kinerja memuat hal-hal sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja Tahun yang dilaporkan
- F. Rencana Anggaran Tahun yang dilaporkan
- G. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
- H. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 3. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian tahun yang dilaporkan dengan beberapa tahun yang terakhir;
 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;
 5. Membandingkan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan dengan standar nasional (jika ada);
 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka pemenuhan tugas Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi dibidang Tenaga Kerja, ESDM, dan ketransmigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara spesifik, terukur secara kuantitatif dan dapat diverifikasi, serta berorientasi pada hasil dengan kerangka waktu yang jelas. Perencanaan strategis bertujuan untuk : 1) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian; 2) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 3) Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa; 4) Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim; 5) Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Diharapkan dengan adanya Renstra ini, pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 memuat penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan

ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo diformulasikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2023 – 2026. Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa
4. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian, dapat dicapai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja
 - Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja.
 - b. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif, dengan indikator kinerja
 - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
 - c. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja

- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Sasaran:
 - a. Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenagalistrikan, dengan indikator kinerjanya :
 - Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik
 3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa, dapat dicapai dengan sasaran :
Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis, dengan indikator kinerjanya :
 - Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan
 4. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim, dapat dicapai dengan sasaran :
Pembangunan Rendah Karbon, dengan indikator kinerjanya:
 - Persentase bauran energi terbarukan
 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, dengan indikator kinerjanya:
 - Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.3.1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Peningkatan kompetensi/kualitas produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan pembinaan kepada pekerja dan pengusaha serta Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis
3. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum
4. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi

Urusan ESDM

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan
2. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan
3. Penetapan Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah, penetapan nilai perolehan Air Tanah dan pemanfaatan air tanah;
4. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

2.3.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja
2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yang bersertifikat
3. Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif
4. Peningkatan kesejahteraan pekerja
5. Meningkatkan akselerasi penyelesaian hukum perselisihan hubungan industrial
6. Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan

7. Meningkatkan kualitas system manajemen Kesehatan keselamatan kerja (K3)
8. Meningkatkan akselarasi percepaatan penyelesaian hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja/buruh
9. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transmigrasi

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan ketenagalistrikan
2. Pengelolaan dan Konservasi Energi Terbarukan
3. Menetapkan Zona Konservasi dan Nilai perolehan Air Tanah
4. Pengendalian Pemanfaatan air tanah
5. Meningkatkan pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan
6. Pengawasan terhadap Pemanfaatan Izin izin usaha pertambangan dan izin Usaha Jasa Pertambangan

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka uraian indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan transmigrasi Provinsi Gorontalo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Definisi Operasional	Metodologi/Definisi Operasional
1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Penempatan tenaga kerja pd thn } n - \sum \text{Penempatan tenaga kerja pd thn } (n - 1)}{\sum \text{Penempatan tenaga kerja pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Data kinerja dikumpulkan melalui kompilasi data dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap triwulan.
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang diselesaikan pada tahun } n}{\sum \text{Kasus perselisihan yang dilaporkan pada tahun } n} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Kasus

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Definisi Operasional	Metodologi/Definisi Operasional
				perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan adalah kasus yang difasilitasi oleh pejabat fungsional mediator
3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times$	Data kinerja diperoleh dari hasil pengawasan dari pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan di Provinsi Gorontalo. Informasi terkait jumlah perusahaan yang terdaftar didapatkan melalui WLKP Online.
4.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase jumlah rumah tangga terpasang listrik	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik}}{\sum \text{Rumah Tangga Tidak Mampu yang belum berlistrik di Provinsi Gorontalo}} \times$	Data kinerja diperoleh dari rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi Listrik gratis, sedangkan data rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik merupakan database yang diperoleh dari PLN.
5.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan}}{\sum \text{Masyarakat transmigrasi yang ada}} \times$	Data kinerja diperoleh dari kegiatan pembinaan bagi warga transmigrasi. Informasi terkait jumlah Masyarakat transmigrasi yang ada merupakan database dari kegiatan penempatan warga transmigrasi.
6.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase bauran energi terbarukan	$\frac{\sum \text{Realisasi porsi EBT}}{\sum \text{Total realisasi energi primer}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kegiatan Pengawasan aneka EBT dan dari stakeholder terkait (Pertamina, PLN, IPP, BPS)
7.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	Nilai SAKIP DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo	Data kinerja diperoleh dari Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo atas SAKIP Perangkat Daerah

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang menjadi pemicu dalam pencapaian target dan realisasi apa yang telah direncanakan dalam organisasi. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,5 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%
4. Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenagalistrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	39,74%
5. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	- Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34%
6. Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	13,58%
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	BB

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas dapat dilihat dalam lampiran pada akhir laporan kinerja ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana anggaran program kegiatan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Rencana Anggaran Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.123.383.617

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	25%	538.470.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	25%	285.600.350
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	25%	847.576.276
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	17%	150.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah	43%	100.000.000
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi	100%	150.000.000
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan	2,40%	140.089.300
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik	39,74%	379.646.200
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan satuan permukiman transmigrasi	100%	128.880.000
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pematapan	79%	220.000.000
Total			17.063.645.743

2.7. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Dalam pencapaian sasaran pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, maka alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.

Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	864.070.350
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	859.016.276
3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	161.960.000
4.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase jumlah Rumah Tangga Terpasang Listrik	397.646.200
5.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi local dengan pendekatan kluster Kawasan strategis	Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	374.260.000
6.	Pembangunan rendah karbon	Persentase bauran energi terbarukan	413.799.300
7.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	13.890.893.617

2.8. INSTRUMEN PENDUKUNG

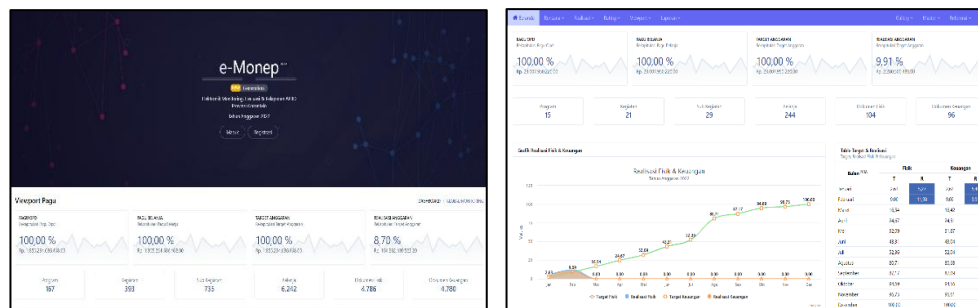
Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi Dinas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi, baik di bangun oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo untuk di gunakan semua OPD maupun Oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Sendiri.

Dalam konteks pengembangan informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah dilingkungan Provinsi Gorontalo. Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Beberapa aplikasi pendukung yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan dimanfaatkan pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

2.8.1. Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (e-Monev)

Sistem Informasi e-Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan baik realisasi keuangan maupun realisasi Fisik pelaksanaan Program Kegiatan setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi **pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah** Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan oleh kepala Daerah.



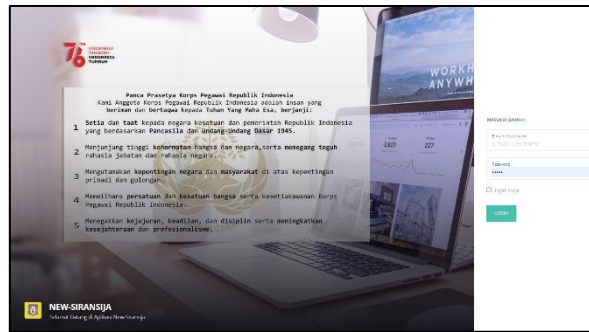
Gambar 2.1 Aplikasi e-Monev

2.8.2. Aplikasi New Siransija

Aplikasi ini merupakan sistim yang dibuat untuk menilai kinerja setiap ASN di Provinsi Gorontalo. Beberapa kinerja ASN yang dinilai dalam aplikasi ini adalah:

- Kehadiran (Disiplin)
- Pelaporan Pajak

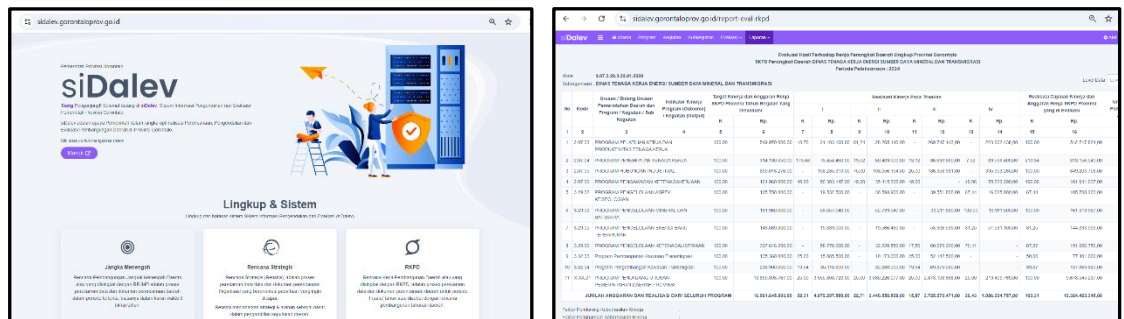
- Integritas
- Etos Kerja
- Gotong Royong



Gambar 2.2 Aplikasi New Siransija

2.8.3. Aplikasi si-Dalev

siDalev adalah Upaya Pemerintah dalam rangka optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.3 Aplikasi si-Dalev



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.1.

Skala Penilaian dari hasil Pengukuran Kinerja

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 91 sampai dengan 100	Sangat Baik
2	≥ 81 sampai dengan 90	Tinggi
3	≥ 71 sampai dengan 80	Sedang
4	≥ 61 sampai dengan 70	Rendah
5	< 60	Sangat Rendah

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan menggunakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 7 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja, semua indikator kinerja dapat diukur secara utuh. Gambaran capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,5%	24,23%	91,43%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%	5,45%	156,16%
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	39,74%	34,96%	87,97%
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	13,58%	12,35%	90,94%
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34%	36,22%	39,65%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	BB	BB	100%

Dari ketujuh sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, 4 (empat) sasaran strategis tidak mencapai target, 2 (dua) sasaran strategis telah mencapai target, dan 1 (satu) sasaran strategis telah melampaui target.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 95,16% (**Sangat Baik**), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran sebagai berikut :

$$\frac{91,43\%+100\%+156,16\%+87,97\%+90,94\%+39,65\%+100\%}{7} = 95,16\%$$

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap target kinerja tahun 2025:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan target tahun 2024 sebesar 26,5%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun n dan tahun n-1. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 7.096 orang, sedangkan capaian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun sebelumnya adalah 5.712 orang. Dari data tersebut, maka

didapatkan capaian persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 24,23%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 100%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebanyak 4 kasus dan jumlah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 4 orang. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan yaitu sebesar 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebesar 3,49 %. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 240 perusahaan dan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online sebanyak 4.405 perusahaan. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu sebesar 5,45%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang listrik sebesar 39,74%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik.

Data awal Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2.471 RTS. Adapun pada tahun 2024, jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis sebanyak 65 RTS sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun

2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan realisasi Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96%.

Sasaran 5 : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan dengan target tahun 2024 sebesar 13,58%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT dengan jumlah total pemanfaatan energi.

Tercatat data bauran energi sebagai berikut : Capaian porsi EBT 12,35%, minyak bumi sebesar 53,14 %, gas bumi sebesar 13,64% dan batubara sebesar 20,87%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 tidak mencapai target atau sebesar 90,94%.

Sasaran 6 : Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,34%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 230 KK dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK . Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan yaitu sebesar 36,22% (tidak mencapai target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Sasaran 7 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT dengan target nilai BB. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, SAKIP yang dievaluasi adalah SAKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023. Hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang evaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 78,11 dengan predikat BB (Sangat Baik).

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.3.

Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket.
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	67,78%	24,23%	-
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	=
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,07%	5,45%	+
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrik	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	34,06%	34,96%	+
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	18,77 %	12,35%	-
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	75,59%	36,22%	-
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	A (81,01)	BB (78,11)	-

Ket :

- = Capaian kinerja tahun pelaporan sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
- + Capaian kinerja tahun pelaporan meningkat dari tahun sebelumnya
- Capaian kinerja tahun pelaporan menurun dari tahun sebelumnya

Dari tabel diatas, dapat digambarkan bahwa ada 4 (empat) capaian kinerja sasaran yang turun dari capaian tahun sebelumnya, 2 (dua) capaian kinerja sasaran yang naik dari capaian tahun sebelumnya dan 1 (satu) capaian kinerja sasaran yang sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap capaian tahun sebelumnya:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan capaian tahun 2024 sebesar 24,23%, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 67,78%. Hal tersebut menggambarkan adanya penurunan capaian 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 43,55%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan capaian tahun 2024 sebesar 100% dan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2 tahun 2024 sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan capaian tahun 2024 sebesar 5,45% sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 3,07%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,38%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang listrik dengan capaian tahun 2024 sebesar 34,96%, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 34,06%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,9%.

Sasaran 5 : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan dengan capaian tahun 2024 sebesar 12,35%, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 18,77%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,42%.

Sasaran 6 : Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 36,22%, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 75,59%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,37%.

Sasaran 7 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT dengan capaian tahun 2024 mendapatkan nilai 78,11 dengan predikat BB, sedangkan capaian tahun 2023 mendapatkan nilai 81,01 dengan predikat A. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,9 poin.

3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan beberapa tahun yang terakhir

Berikut merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan beberapa tahun sebelumnya :

Tabel 3.4.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 s/d 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	22,77%	67,78%	24,23%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2,66%	3,07%	5,45%
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	26,94%	34,06%	34,96%
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	8,90%	18,77 %	12,35%
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	Na	75,59%	36,22%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	Na	A (81,01)	BB (78,11)

Dari tabel tersebut di atas, ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya (tahun 2022 s/d 2024), akan tetapi 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang lain tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator kinerja baru. Kedua indikator kinerja sasaran tersebut baru dirumuskan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sehingga data yang tersedia dimulai tahun 2023.

3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Berikut merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah:

Tabel 3.5.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra s/d 2024
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	24,23%	28,50%	85,02%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	5,45%	4,31%	126,45%
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	34,96%	48%	72,83%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra s/d 2024
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	12,35%	16,38%	75,40%
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	36,22%	100%	36,22%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	BB (78,11)	A (>80-90)	97,64%

Dari tabel diatas, dapat digambarkan bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran telah melampaui target akhir Renstra, 1 (satu) indikator kinerja sasaran telah mencapai target akhir Renstra dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran masih belum mencapai target akhir Renstra.

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap capaian tahun sebelumnya:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan capaian tahun 2024 sebesar 24,23%, sedangkan target akhir renstra sebesar 28,50% sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 85,02%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan capaian tahun 2024 sebesar 100% sedangkan target akhir Rentra sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100% atau telah mencapai target. Akan tetapi, pencapaian untuk indikator ini merupakan pencapaian setiap tahun atau tidak diakumulasi dengan capaian tahun sebelumnya sehingga target akhir renstra tidak bisa menjadi perbandingan untuk capaian kinerja setiap tahunnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan capaian tahun 2024 sebesar 5,45% sedangkan

target akhir renstra sebesar 4,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 126,45% atau telah melampaui target akhir renstra. Akan tetapi, pencapaian untuk indikator ini merupakan pencapaian setiap tahun atau tidak diakumulasi dengan capaian tahun sebelumnya sehingga target akhir renstra tidak bisa menjadi perbandingan untuk capaian kinerja setiap tahunnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang listrik dengan capaian tahun 2024 sebesar 34,96%, sedangkan target akhir renstra sebesar 48% sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 72,83%.

Sasaran 5 : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan dengan capaian tahun 2024 sebesar 12,35%, sedangkan target akhir renstra sebesar 16,38% sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 75,40%.

Sasaran 6 : Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 36,22%, sedangkan target akhir renstra sebesar 100% sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 36,22%. Akan tetapi, pencapaian untuk indikator ini merupakan pencapaian setiap tahun atau tidak diakumulasi dengan capaian tahun sebelumnya sehingga target akhir renstra tidak bisa menjadi perbandingan untuk capaian kinerja setiap tahunnya.

Sasaran 7 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT dengan capaian tahun 2024 mendapatkan nilai 78,11 dengan predikat BB, sedangkan target akhir renstra adalah predikat A dengan rentang nilai >80-90 sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 97,64%.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran bisa dilakukan dengan memeriksa berbagai faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Faktor-faktor tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal, serta dapat mencakup berbagai aspek yang lebih spesifik.

Berikut adalah uraian mengenai analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja masing-masing sasaran :

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian sasaran ini yaitu antara lain :

1. Ketidaksesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Banyaknya jumlah lowongan kerja terdaftar yang tidak sebanding dengan jumlah penempatan tenaga kerja menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2. Kurangnya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian jumlah serapan tenaga kerja, seperti kegiatan bursa kerja, pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja, pemagangan dalam negeri maupun luar negeri, dan pemberdayaan Masyarakat.
3. Bahwa untuk menjawab permasalahan penyebab kegagalan maka Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Gorontalo
4. Selain membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Gorontalo, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah melakukan Kerjasama dengan :
 - a) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Gorontalo tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan standar industri PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor 724/PEMKESRA/KB/XII/2024 Nomor 004/SAT-GTO/HC/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 berlaku selama 5 (lima) tahun

- b) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan Baznas Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Nomor 415 Tahun 2024 tanggal 415 Tahun 2024 Tanggal 9 Desember 2024 berlaku selama 1 (satu) tahun
- c) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 2876/UN47.B9/KS/2024 Nomor 560/DTKESDMT/1203/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 berlaku selama 1 (satu) tahun
- d) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Nomor 425/UBM/MoA/HK.07.00/2024 Nomor 560/DTKESDMT-BLK/224/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 berlaku selama 5 (lima) tahun

Sasaran 2 : Meningkatkan Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini telah mencapai target. Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini adalah masih kurangnya kasus perselisihan yang terjadi atau yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sehingga hal itu menunjukkan kondisi hubungan industrial yang kondusif. Meskipun demikian, dalam pencapaian sasaran ini pun masih ada faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya dalam pelaksanaan tugas terkait hubungan industrial yaitu masih kurangnya pejabat fungsional mediator di Provinsi Gorontalo, yang mana pejabat fungsional tersebut yang bertugas menangani kasus perselisihan hubungan industrial.

Sasaran 3 : Meningkatkan Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini telah melampaui target dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran ini yaitu antara lain :

1. Adanya kebijakan ketenagakerjaan yang jelas dan mendetail tentang hak-hak pekerja, seperti upah minimum, jam kerja, jaminan social dan perlindungan keselamatan kerja
2. Adanya pengawasan ketenagakerjaan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Meskipun capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target, akan tetapi masih ada faktor yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini yaitu masih kurangnya pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan. Tercatat pejabat fungsional pengawas yaitu sebanyak 12 (duabelas) orang, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang tercatat pada WLKP Online sebanyak 4.405 perusahaan. Selain itu, masih minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawas ketenagakerjaan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang Listrik. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini tidak mencapai target namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut merupakan faktor penyebab kegagalan atas pencapaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

1. Dalam menghitung capaian kinerja ini, capaian jumlah rumah tangga terpasang Listrik diakumulasi dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menyebabkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dari capaian tahun sebelumnya meskipun tidak mencapai target tahun pelaporan.
2. Kurangnya anggaran untuk kegiatan pemasangan instalasi Listrik bagi rumah tangga tidak mampu, dimana kegiatan tersebut yang mendukung pencapaian sasaran ini.

Sasaran 5 : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berikut merupakan faktor penyebab kegagalan atas pencapaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

1. Sulitnya mendapatkan data dari stakeholder terkait

2. Adanya kesalahan penetapan target kinerja dimana target tersebut mengacu pada dokumen RUED Provinsi Gorontalo. Mengingat keterlambatan rilis data Bauran Energi Daerah, seharusnya target tahun n pada dokumen RUED, menjadi target tahun n+1 pada dokumen Renstra.

Sasaran 6 : Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan faktor penyebab kegagalan atas pencapaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

1. Kurangnya anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Output dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah jumlah Masyarakat yang dikembangkan, sedangkan target tahun 2024 untuk kegiatan ini menurun dari tahun sebelumnya.
2. Masih kurangnya kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pengembangan warga transmigrasi

Sasaran 7 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT. Dilihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berikut merupakan faktor penyebab kegagalan atas pencapaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

1. Pencapaian sasaran ini menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena penilaian tahun sebelumnya merupakan penilaian terhadap SAKIP tahun anggaran 2022, dimana pada tahun itu Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi masih bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP atau masih dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Hasil nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sudah predikat A dari beberapa tahun sebelumnya.
2. Menurut penyampaian Inspektorat Provinsi Gorontalo, setelah pemisahan OPD, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi merupakan OPD baru yang dalam penilaian SAKIP tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16.961.645.743,- dengan realisasi sebesar Rp 16.633.188.181 atau 98,06%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo serta entitasnya adalah 1,94%. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

Tabel 3.6
Efisiensi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	91,43%	99,05%	0,95%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	98,86%	1,14%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	156,16%	99,99%	0,01%
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	87,97%	98,66%	1,34%
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	90,94%	99,69%	0,31%
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	39,65%	97,58%	2,42%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	100%	97,88%	2,12%

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 11 program, 17 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan gambaran pelaksanaan pencapaian kinerja ketujuh sasaran sebagaimana berikut :

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Outcome dari program ini adalah Persentase pencari kerja yang dilatih dengan target sebesar 25%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan besarnya jumlah peserta pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja yang dibiayai APBD Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja telah memberikan pelatihan bagi 80 orang pencari kerja dari target 80 orang, sehingga capaian Persentase pencari kerja yang dilatih sebesar 25%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi

Output kegiatan adalah 80 orang tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan target sebanyak 50 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Aktivitas dari kegiatan ini adalah pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 50 orang peserta magang pada 8 perusahaan di Provinsi Gorontalo.

Berikut perusahaan Lokasi pemagangan dalam negeri tahun 2024 :

1. PT. Nenggapratama Prima Nusantara
2. PT. Gembira Grosir Sejahterah
3. PT. BFI Finance
4. Hotel Damhil
5. Hotel Citra Ayu
6. Arafah Akrilik
7. CV. Cahaya Ighniya

8. Adila Cake & Kukis

- *Sub kegiatan* : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan target sebanyak 30 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Aktivitas dari kegiatan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo. Realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 30 orang atau 100%. Pelatihan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Pakan Ikan dan Unggas di 2 (dua) lokasi yaitu :
 1. Desa Jatimulyo Kec. Wonosari Kab. Boalemo sebanyak 15 orang peserta
 2. Yayasan Putra Mandiri Kel. Molosipat U Kec. Sibatana Kota Gorontalo sebanyak 15 orang peserta, dimana kelima belas peserta tersebut merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yaitu tuna wicara

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Outcome dari program ini adalah Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dengan target sebesar 25%. Pada tahun 2024, capaian untuk indicator outcome ini yaitu sebesar 53,46%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Output kegiatan adalah 6000 orang pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karirhub). Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan target sebanyak 6000 orang pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karirhub). Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan kompilasi data dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 tercatat jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online adalah sebanyak 12.822 orang.

3) Program Hubungan Industrial

Outcome dari program ini adalah Persentase jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan target sebesar 25%. Pada tahun 2024, capaian indicator outcome ini yaitu sebesar 25%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 4 kasus hubungan industrial yang diselesaikan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 50 perkara perselisihan yang terselesaikan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 4 perkara perselisihan yang terselesaikan dari 4 perkara yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Tidak tercapainya target penyelesaian perkara hubungan industrial ini menggambarkan kondisi hubungan industrial yang kondusif dikarenakan kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih sedikit dari target.
2. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
- Output kegiatan adalah 1 (satu) dokumen UMP yang ditetapkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- *Sub kegiatan* : Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dengan target 1 SK penetapan UMP. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah SK Gubernur Gorontalo Nomor 482/34/XII/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp 3.221.731,-
 - *Sub Kegiatan* : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan target 2.301 tenaga

kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 2.301 orang atau 100%.

4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa dengan target 17%. Pada tahun 2024 capaian indicator outcome ini sebesar 33,33%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah Perusahaan yang dibina sebanyak 240 perusahaan dan jumlah Perusahaan yang diperiksa sebanyak 720 perusahaan.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Output kegiatan adalah 240 perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dengan target 420 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 240 Perusahaan atau 57,14%. Selain itu penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan tahun 2024 yaitu :

1. PT Bermuda Konsultan Kota Gorontalo Pelanggaran UU No.24 /2011 ttg BPJS
2. PT. Royal Coconut Kab. Gorontalo Pelanggaran UU 3/1951 ttg pengawasan perburuhan (Tipiring)
3. PT. Petrolindo Energi Perkasa, Kab. Bone Bolango Pelanggaran UU No.6/2023 ttg Penetapan Perppu No 2/2022 ttg cipta kerja

5) Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Outcome dari program ini adalah Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan dengan target sebesar 2,40%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2024 tercatat bahwa pemanfaatan potensi energi terbarukan sebesar 36,21 mw dari total potensi energi terbarukan Provinsi Gorontalo sebesar 1.852 mw atau dengan persentase sebesar 1,95%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

Output kegiatan adalah 1 dokumen pengelolaan energi terbarukan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah dengan target sebanyak 1 laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 1 laporan atau 100%.
2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
- Output kegiatan adalah 1 dokumen pengelolaan konservasi energi. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- *Sub kegiatan* : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi dengan target sebanyak 1 laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

6) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Outcome dari program ini adalah Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah dengan target 43%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah dokumen konservasi Air Tanah yang disusun dan jumlah zona konservasi Air Tanah. Pada tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian outcome tidak dilaksanakan karena tidak mendapatkan alokasi anggaran, sehingga capaian outcome sampai dengan tahun 2024 masih sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 29%. Nilai tersebut diperoleh dari 2 (dua) data zona konservasi yang tersedia dari 7 (tujuh) zona konservasi air tanah. Hal itu menggambarkan pencapaian outcome dari target yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar 67,44%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 1 laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah dengan target sebanyak 1 laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 1 laporan atau 100%.

7) Program Pengelolaan Mineral Non Logam dan Batuan

Outcome dari program ini adalah Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dengan target 100%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda dan jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi. Tercatat pada tahun 2024 telah diterbitkan 28 rekomendasi teknis usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekomendasi Teknis IUP Batuan Tahap Eksplorasi berjumlah 14 Rekomtek
2. Rekomendasi Teknis IUP Batuan Tahap Operasi produksi berjumlah 8 Rekomtek
3. Rekomendasi Teknis SIPB berjumlah 6 Rekomtek

Hal tersebut menggambarkan Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan mencapai 100%.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Output kegiatan adalah 1 laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil dengan target sebanyak 1 laporan hasil pengendalian pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah

laut sampai dengan 12 mil dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 1 laporan atau 100%.

8) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Outcome dari program ini adalah Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik sebesar 39,74%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik. Data awal Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis dengan daya 900VA pada tahun 2024 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96% atau 87,97% dari target yang ditetapkan.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 3 dokumen rekomendasi izin operasi yang diterbitkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan target sebanyak 2 rekomendasi izin operasi yang diterbitkan dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 3 rekomendasi atau 150%.

2. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Output kegiatan adalah 65 Kepala Keluarga penerima manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan target sebanyak 60 keluarga penerima manfaat Listrik gratis dari kelompok Masyarakat tidak mampu dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 65

keluarga atau 108,33%. Pelaksanaan pemasangan instalasi Listrik gratis berlokasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 364/34/IX/2024 dan 468/34/IX/2024 terdiri dari :

- a) Kota Gorontalo : 2 rumah tangga
- b) Kabupten Gorontalo : 18 rumah tangga
- c) Kabupaten Boalemo : 8 rumah tangga
- d) Kabupaten Bone Bolango : 8 rumah tangga
- e) Kabupaten Gorontalo Utara : 29 rumah tangga

9) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program ini adalah Persentase Pembangunan satuan permukiman transmigrasi dengan target sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan jumlah satuan permukiman binaan. Pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun sebanyak 2 SP dan jumlah satuan permukiman transmigrasi binaan sebanyak 4 SP sehingga capaian Persentase Pembangunan satuan permukiman transmigrasi sebesar 50%. Tidak tercapainya target outcome ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal ke semua Lokasi transmigrasi binaan.

➤ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 2 satuan permukiman transmigrasi yang dibangun. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub kegiatan* : Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal) dengan target sebanyak 2 paket bantuan non standar yang diberikan kepada transmigran dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebanyak 2 paket atau 100%. Paket bantuan yang diberikan adalah sarana prasarana penunjang pertanian pada 3 (tiga) kelompok dimana masing-masing kelompok berjumlah 10 orang, sehingga jumlah Masyarakat yang mendapatkan bantuan sebanyak 60 orang. Bantuan tersebut dialokasikan di

Kimtrans Motihelumo Kab. Gorontalo Utara dan Kimtrans Pangea SP3 Kab. Boalemo.

10) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan Masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan dengan target 79%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Masyarakat yang diberikan penguatan dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan. Pada tahun 2024 bahwa jumlah Masyarakat yang diberikan penguatan sebanyak 200 orang dan jumlah Masyarakat transmigrasi yang ada sebanyak 635 orang sehingga capaian Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan sebesar 31,50%. Tidak tercapainya target outcome ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal ke semua Lokasi transmigrasi binaan.

➤ **Pelaksanaan Program**

1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
Output kegiatan adalah 2 satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - *Sub kegiatan* : Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman dengan target sebanyak 2 Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 2 SP atau 100%. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa pembinaan mental dan spiritual kepada 200 orang warga transmigrasi.

11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

➤ **Pelaksanaan Program**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah 6 dokumen yang terdiri dari 2 dokumen perencanaan dan 4 dokumen evaluasi perangkat daerah dan pada tahun 2024 telah terealisasi 6 dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat

daerah. Output kegiatan ini dicapai dari pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sub Kegiatan* : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 2 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu:
 1. Rencana Kerja (Renja) OPD
 2. Renstra Perubahan OPD
 - *Sub Kegiatan* : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 4 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 3. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
 4. Laporan Kinerja Triwulan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagaimana berikut :
- *Sub Kegiatan* : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Capaian dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 1 laporan akhir tahun SKPD.
 - *Sub Kegiatan* : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Capaian dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 100 orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan sebagaimana berikut :
- *Sub Kegiatan* : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 10 paket sarana prasarana yang disediakan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja. Capaian dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan target yang sudah ditetapkan.

Berikut tabel analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja :

Tabel 3.7.
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Nama Program	Keuangan		
							Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,5%	24,23%	91,43%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	549.970.000	542.717.821	98,68
						Program Penempatan Tenaga Kerja	314.100.350	313.156.040	99,70
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	Program Hubungan Industrial	859.016.276	849.203.708	98,86
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah 50 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%	5,45%	156,16%	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	161.960.000	161.941.637	99,99
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	39,74%	34,96%	87,97%	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	397.646.200	392.299.183	98,66
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	13,58%	12,35%	90,94%	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	146.089.300	144.893.099	99,18
						Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	105.750.000	105.708.200	99,96

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Nama Program	Keuangan		
							Pagu	Realisasi	%
						Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	161.960.000	161.919.967	99,98
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34%	36,22%	39,65%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.360.000	135.110.860	99,82
						Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	238.900.000	230.080.790	96,31
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	BB	BB	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.890.893.617	13.596.156.876	97,88

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2024, alokasi anggaran APBD yang diberikan sebesar Rp. 16.961.645.743,- telah direalisasi sebesar Rp 16.633.188.181,- atau 98,06%. Berikut gambaran realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2024 :

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	864.070.350	855.873.861	99,05%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	859.016.276	849.203.708	98,86%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	161.960.000	161.941.637	99,99%
4	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	397.646.200	392.299.183	98,66%
5	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	413.799.300	412.521.266	99,69%
6	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	374.260.000	365.191.650	97,58%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	13.890.893.617	13.596.156.867	97,88%
Total			16.961.645.743	16.633.188.181	98,06



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024. LKIP disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan periode kedua dari Renstra 2023-2026. Adapun Kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yaitu :

1. Dari ketujuh sasaran strategis yang diukur pencapaian kinerjanya, 4 (empat) sasaran strategis tidak mencapai target, 2 (dua) sasaran strategis telah mencapai target, dan 1 (satu) sasaran strategis telah melampaui target.
2. Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 95,16% (Sangat Baik).
3. Apabila capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka tercatat bahwa ada 4 (empat) capaian kinerja sasaran yang turun dari capaian tahun sebelumnya, 2 (dua) capaian kinerja sasaran yang naik dari capaian tahun sebelumnya dan 1 (satu) capaian kinerja sasaran yang sama dengan capaian tahun sebelumnya.

4. Ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya (tahun 2022 s/d 2024), akan tetapi 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang lain tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator kinerja baru. Kedua indikator kinerja sasaran tersebut baru dirumuskan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sehingga data yang tersedia dimulai tahun 2023.
5. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, maka pencapaian sampai dengan tahun 2024 tercatat bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran telah melampaui target akhir Renstra, 1 (satu) indikator kinerja sasaran telah mencapai target akhir Renstra dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran masih belum mencapai target akhir Renstra.

4.2. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo maka perlu dirumuskan beberapa saran atau langkah perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik
2. Penajaman pada indikator tujuan strategis yang merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja.
3. Meningkatkan peran controlling pada internal Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Terhadap rekomendasi Inspektorat atas evaluasi SAKIP tahun lalu sudah di tindaklanjuti di tahun ini oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur Gorontalo dan pihak lain yang berkepentingan untuk menjadi bahan evaluasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo senantiasa dapat tercapai.

LAMPIRAN



GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARDOYO MANSUR PONGOLIU**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDY SALAHUDDIN**

Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



RUDY SALAHUDDIN

Pihak Pertama,



WARDOYO MANSUR PONGOLIU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3
1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	27%
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,90%
4. Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenagalistrikan	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	43,87%
5. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	- Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	94,49%
6. Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	15,40%
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DTK-ESDMT	BB

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 437.000.000	APBD
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 185.600.000	APBD
3	Program Hubungan Industrial	Rp 797.576.276	APBD
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 100.000.000	APBD
5	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp 220.000.000	APBD
6	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp 120.000.000	APBD
7	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp 132.873.000	APBD
8	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 334.446.200	APBD
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 100.000.000	APBD
10	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 170.000.000	APBD
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 17.285.263.729	APBD
TOTAL		Rp 19.882.759.205	

Pj. Gubernur Gorontalo,



RUDY SALAHUDDIN

Gorontalo, 6 Januari 2025

Kepala Dinas



WARDOYO MANSUR PONGOLIU

**DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi Pengumpulan Data Kinerja/Definisi Operasional	Sumber Data
1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun } n}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar pada tahun } n} \times 100\%$	Data kinerja dikumpulkan melalui kompilasi data dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap triwulan.	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang diselesaikan pada tahun } n}{\sum \text{Kasus perselisihan yang dilaporkan pada tahun } n} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan adalah kasus yang difasilitasi oleh pejabat fungsional mediator	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari hasil pengawasan dari pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan di Provinsi Gorontalo. Informasi terkait jumlah perusahaan yang terdaftar didapatkan melalui WLKP Online.	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase jumlah rumah tangga terpasang listrik	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik}}{\sum \text{Rumah Tangga Tidak Mampu yang belum berlistrik di Provinsi Gorontalo}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi Listrik gratis, sedangkan data rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik merupakan database yang diperoleh dari PLN.	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
5.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi	Persentase jumlah Masyarakat	$\frac{\sum \text{Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan}}{\sum \text{Masyarakat transmigrasi yang ada}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kegiatan pembinaan bagi warga transmigrasi.	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi Pengumpulan Data Kinerja/Definisi Operasional	Sumber Data
	lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	transmigrasi yang dikembangkan		Informasi terkait jumlah Masyarakat transmigrasi yang ada merupakan database dari kegiatan penempatan warga transmigrasi.	
6.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase bauran energi terbarukan	$\frac{\Sigma \text{Realisasi porsi EBT}}{\Sigma \text{Total realisasi energi primer}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kegiatan Pengawasan aneka EBT dan dari stakeholder terkait (Pertamina, PLN, IPP, BPS)	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
7.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	Nilai SAKIP DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo	Data kinerja diperoleh dari Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo atas SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi

Gorontalo, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM & Transmigrasi
Provinsi Gorontalo



Drs. WARDOYO MANSUR PONGOLIU, M.Si
NIP. 19690524 198902 1 002

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Kinerja Triwulanan				Program	Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	27%				27%	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja	437.000.000 185.600.000
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	25%	25%	25%	25%	3. Program Hubungan Industrial	797.576.276
3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,90%				3,90%	4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	100.000.000
4.	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	43,87%				43,87%	5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	334.446.200
5.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	94,49%		47,25%	47,24%		6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000
								7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	170.000.000
6.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase bauran energi terbarukan	15,40%				15,40%	8. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	132.873.000
								9. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	220.000.000
								10. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	120.000.000
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	BB				BB	11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.285.263.729

Gorontalo, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM & Transmigrasi
Provinsi Gorontalo



Drs. WARDOYO MANSUR PONGOLIU, M.Si
NIP. 19690524 198902 1 002



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Telp. 0435 - 879035

TINDAKLANJUT REKOMENDASI
HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	BUKTI DUKUNG
1	Mempublikasikan/mengunggah dokumen perencanaan kinerja tepat waktu baik di e-SAKIP Reviu maupun di website OPD/Pemprov	Melakukan publikasi/mengunggah dokumen perencanaan kinerja lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan	Maret 2025	Untuk publikasi dokumen perencanaan kinerja di website, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum mempunyai website sehingga perlu melakukan publikasi di website Pemprov. Kendala yang dihadapi, penyusun LKIP OPD telah menghubungi admin website Pemprov namun tidak direspon	Menyurat ke Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo untuk website Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	https://drive.google.com/file/d/1SEpSciBmWJkL9f7K01V_GSnXK5tjWse4/view?usp=sharing
				Untuk publikasi di e-SAKIP Reviu, dapat dilakukan setelah mendapatkan pernyataan telah direviu dari fasilitator/pendamping masing-masing perangkat daerah	Segera melakukan perbaikan tindaklanjut hasil asistensi oleh fasilitator/pendamping	https://drive.google.com/file/d/1Xl33sXVlADI09iWmyrp8We8RtKpMRyal/view?usp=sharing
2	Menguraikan strategi, kebijakan, dan aktivitas keterkaitan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain pada crosscutting	Melakukan perbaikan pada dokumen pohon kinerja dengan menguraikan strategi, kebijakan dan aktivitas keterkaitan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain pada crosscutting	Februari 2025	Telah menguraikan strategi, kebijakan dan aktivitas keterkaitan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain pada crosscutting tanpa menemukan kendala	-	https://drive.google.com/file/d/1JaV7HXZb7JJ1QHj3Eh5W3eZzUCM8O54D/view?usp=sharing
3	Mempublikasikan/mengunggah dokumen LKIP tepat waktu baik di e-SAKIP Reviu maupun di website OPD/Pemprov	Melakukan publikasi/mengunggah dokumen LKIP lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan	Maret 2025	Untuk publikasi dokumen LKIP di website, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum mempunyai website sehingga perlu melakukan publikasi di website Pemprov. Kendala yang dihadapi, penyusun LKIP OPD telah menghubungi admin website Pemprov namun tidak direspon	Menyurat ke Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo untuk website Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	https://drive.google.com/file/d/1SEpSciBmWJkL9f7K01V_GSnXK5tjWse4/view?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	BUKTI DUKUNG
				Untuk publikasi di e-SAKIP Reviu, dapat dilakukan setelah mendapatkan pernyataan telah direviu dari fasilitator/pendamping masing-masing perangkat daerah	Segera melakukan perbaikan tindaklanjut hasil asistensi oleh fasilitator/pendamping	https://drive.google.com/file/d/1Xl33sXVjADl09iWmyrp8We8RtKpMRyal/view?usp=sharing
4	Memperhatikan dan melaksanakan rencana dan lagkah perbaikan kinerja yang akan di tempuh pada periode selanjutnya seperti yang sudah direncanakan dan dikemukakan di	Menguraikan rencana dan langkah perbaikan kinerja yang akan ditempuh pada periode selanjutnya pada dokumen LKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	Februari 2025	Rencana dan langkah perbaikan kinerja yang akan ditempuh pada periode selanjutnya telah diuraikan di Bab IV Dokumen LKIP tanpa menemukan kendala	-	https://drive.google.com/file/d/1LdTroLDi1D1gWtM7_S1fOHoMIS59UwAX/view?usp=sharing

Gorontalo, 20 Maret 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo


Des. WARDOYO M. PONGOLIU, M.Si
NIP. 19690524 198902 1 002

